

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : DENI SETIADI
NIK : 3578040409860004
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA SURABAYA
Jabatan : PANITERA PENGANTI
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 6 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DENI SETIADI
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 689266

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/70 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 111.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA MATIC / BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 102.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.247.540

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.517.247.540

III. HUTANG Rp. 704.104.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 813.143.540

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Direktorat Jenderal... 14.41



kepada saya ▾

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**Direktorat Jenderal Pajak**Layanan Informasi & Pengaduan: (021)
1500200 informasi@pajak.go.id
pengaduan@pajak.go.id**BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)**Nomor BPE : **BPE-30184/CT/KPP.1107/2026**

Tanggal : 26 Februari 2026

NPWP : 3578040409860004

Nama Wajib
Pajak : DENI SETIADIJenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak
Orang Pribadi

Tahun Pajak : 2025

Masa Pajak : Januari - Desember 2025

Status SPT : Normal

Saluran : Portal Wajib Pajak

Tanggal
Terima SPT : 26 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax

← Balas

→ Teruskan

